

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 101);
27. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:



- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 43.824.300.560.665,00
b. Belanja Daerah	Rp <u>37.799.664.298.459,00</u>
Surplus	Rp 6.024.636.262.206,00
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 7.593.994.776.473,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>4.456.716.331.883,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 3.137.278.444.590,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	
Sebelum Koreksi	Rp 9.161.914.706.796,00
Koreksi SiLPA	<u>(Rp 1.017.097.563,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Jumlah Rp 9.160.897.609.233,00

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 21.217.798.846.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | Rp 65.042.099.407.000,00        |
| b. Realisasi           | <u>Rp 43.824.300.560.665,00</u> |
| Selisih kurang         | (Rp 21.217.798.846.335,00)      |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 25.850.442.085.014,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja | Rp 63.650.106.383.473,00        |
| b. Realisasi        | <u>Rp 37.799.664.298.459,00</u> |
| Selisih kurang      | (Rp 25.850.442.085.014,00)      |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 4.632.643.238.679,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Surplus/defisit | Rp 1.391.993.023.527,00        |
| b. Realisasi                | <u>Rp 6.024.636.262.206,00</u> |
| Selisih lebih               | Rp 4.632.643.238.679,00        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 269.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 7.863.394.776.473,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp 7.593.994.776.473,00</u> |
| Selisih kurang                    | (Rp 269.400.000.000,00)        |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 4.798.671.468.117,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 9.255.387.800.000,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp 4.456.716.331.883,00</u> |
| Selisih kurang                     | (Rp 4.798.671.468.117,00)      |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 4.529.271.468.117,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | (Rp 1.391.993.023.527,00)      |
| b. Realisasi                 | <u>Rp 3.137.278.444.590,00</u> |
| Selisih lebih                | Rp 4.529.271.468.117,00        |
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 terdiri dari:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Saldo Kas di BUD<br>per 31 Desember 2014                               | Rp 8.785.926.290.869,00      |
| b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran<br>(Sisa Uang Persediaan tahun 2014) | <u>Rp 374.971.318.364,00</u> |
| SiLPA Tahun 2014  | Rp 9.160.897.609.233,00      |

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 425.353.600.919.701,00
b. Jumlah kewajiban	Rp 577.594.425.006,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 424.776.006.494.695,00

## Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014	Rp 7.306.204.021.184,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 16.082.604.402.725,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	
Aset non- keuangan	(Rp 10.395.554.081.052,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 4.037.853.389.589,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 115.503.919.544,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp 9.069.887.775.249,00

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
- e. Lampiran V : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
- f. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi)

## Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : ( 5 /2015)



LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / ( Berkurang )	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN DAERAH	65,042,099,407,000.00	43,824,300,560,665.83	(21,217,798,846,334.17)	67.38
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39,757,308,437,000.00	31,274,215,885,719.83	(8,483,092,551,280.17)	78.66
4.1.1	Pajak Daerah	32,500,000,000,000.00	27,050,949,023,586.12	(5,449,050,976,413.88)	83.23
4.1.2	Retribusi Daerah	1,746,418,633,000.00	515,162,936,406.00	(1,231,255,696,594.00)	29.50
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	448,856,617,000.00	465,979,962,538.00	17,123,345,538.00	103.81
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	5,062,033,187,000.00	3,242,123,963,189.71	(1,819,909,223,810.29)	64.05
4.2	DANA PERIMBANGAN	17,770,000,000,000.00	9,677,533,225,272.00	(8,092,466,774,728.00)	54.46
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17,684,041,718,000.00	9,591,547,943,272.00	(8,092,493,774,728.00)	54.24
4.2.2	Dana Alokasi Umum	85,958,282,000.00	85,985,282,000.00	27,000,000.00	100.03
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,514,790,970,000.00	2,872,551,449,674.00	(4,642,239,520,326.00)	38.23
4.3.1	Pendapatan Hibah	5,000,000,000,000.00	389,614,752,674.00	(4,610,385,247,326.00)	7.79
4.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,514,790,970,000.00	2,482,936,697,000.00	(31,854,273,000.00)	98.73
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BELANJA DAERAH	63,650,106,383,473.00	37,799,664,298,459.00	(25,850,442,085,014.00)	59.39
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17,125,171,023,594.00	12,631,884,602,347.00	(4,493,286,421,247.00)	73.76
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	13,078,480,359,717.00	10,472,324,236,817.00	(2,606,156,122,900.00)	80.07
5.1.2	BELANJA BUNGA	4,353,828,000.00	1,218,528,851.00	(3,135,299,149.00)	27.99
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	BELANJA HIBAH	2,714,824,096,501.00	1,462,044,387,771.00	(1,252,779,708,730.00)	53.85
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,220,977,869,500.00	680,155,340,000.00	(540,822,529,500.00)	55.71
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	37,309,663,220.00	14,005,706,784.00	(23,303,956,436.00)	37.54

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / ( Berkurang )	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	69,225,206,656.00	2,136,402,124.00	(67,088,804,532.00)	3.09
5.2	BELANJA LANGSUNG	46,524,935,359,879.00	25,167,779,696,112.00	(21,357,155,663,767.00)	54.10
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,897,845,249,900.00	2,132,264,554,976.00	(765,580,694,924.00)	73.58
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,096,459,409,318.00	12,624,396,750,887.00	(5,472,062,658,431.00)	69.76
5.2.3	BELANJA MODAL	25,530,630,700,661.00	10,411,118,390,249.00	(15,119,512,310,412.00)	40.78
	Surplus / ( Defisit )	1,391,993,023,527.00	6,024,636,262,206.83	4,632,643,238,679.83	432.81
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(1,391,993,023,527.00)	3,137,278,444,590.00	4,529,271,468,117.00	0.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,863,394,776,473.00	7,593,994,776,473.00	(269,400,000,000.00)	96.57
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7,593,994,776,473.00	7,593,994,776,473.00	0.00	100.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	269,400,000,000.00	0.00	(269,400,000,000.00)	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9,255,387,800,000.00	4,456,716,331,883.00	(4,798,671,468,117.00)	48.15
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	73,101,911,062.00	73,101,911,062.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,246,000,000,000.00	4,370,626,071,289.00	(4,875,373,928,711.00)	47.27
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	9,387,800,000.00	8,169,288,822.00	(1,218,511,178.00)	87.02
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	4,819,060,710.00	4,819,060,710.00	0.00
	Pembiayaan Neto	(1,391,993,023,527.00)	3,137,278,444,590.00	4,529,271,468,117.00	0.00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0.00	9,160,897,609,232.83	9,160,897,609,232.83	0.00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan		Belanja	
				Setelah Perubahan Realisasi	Bertambah/(Berkurang) (Rp / %)	Setelah Perubahan Realisasi	Bertambah/(Berkurang) (Rp / %)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			URUSAN WAJIB				
1	01		PENDIDIKAN	2,000,000,000.00 1,618,953,000.00	(381,047,000.00) 80.95	14,020,835,792,536.00 10,037,423,135,277.00	(3,983,412,657,259.00) 71.59
1	01	001	DINAS PENDIDIKAN	2,000,000,000.00 1,618,953,000.00	(381,047,000.00) 80.95	14,020,806,862,536.00 10,037,423,135,277.00	(3,983,383,727,259.00) 71.59
			5.1.1 BELANJA PEGAWAI			6,808,097,273,717.00 5,887,228,659,713.00	(920,868,614,004.00) 86.47
			5.2.1 BELANJA PEGAWAI			376,837,059,174.00 314,062,575,378.00	(62,774,483,796.00) 83.34
			5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA			1,848,172,691,787.00 1,550,461,428,688.00	(297,711,263,099.00) 83.89
			5.2.3 BELANJA MODAL			4,987,699,837,858.00 2,285,670,471,498.00	(2,702,029,366,360.00) 45.83
1	01	1.20.021	Kota Administrasi Jakarta Pusat			28,930,000.00 0.00	(28,930,000.00) 0.00
			5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA			28,930,000.00 0.00	(28,930,000.00) 0.00
1	02		KESEHATAN	1,068,350,830,000.00 1,029,622,987,009.00	(38,727,842,991.00) 96.37	6,963,636,829,265.00 5,477,833,433,698.00	(1,485,803,395,567.00) 78.66
1	02	001	DINAS KESEHATAN	265,347,830,000.00 230,768,956,024.00	(34,578,873,976.00) 86.97	3,179,893,541,272.00 2,420,554,457,422.00	(759,339,083,850.00) 76.12
			5.1.1 BELANJA PEGAWAI			631,496,244,000.00 534,643,122,194.00	(96,853,121,806.00) 84.66
			5.2.1 BELANJA PEGAWAI			273,362,460,145.00 220,440,057,830.00	(52,922,402,315.00) 80.64
			5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA			799,156,446,351.00 580,478,724,141.00	(218,677,722,210.00) 72.64

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan (Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang) )			SILPA TAB
				Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto	
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				
		380	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	7,863,394,776,473.00	9,255,387,800,000.00	(1,391,993,023,527.00)	0.00
				7,593,994,776,473.00	4,456,716,331,883.00	3,137,278,444,590.00	9,160,897,609,232.83
				(269,400,000,000.00)	(4,798,671,468,117.00)	4,529,271,468,117.00	9,160,897,609,232.83

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20										OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN									
ORGANISASI : 1.20.001										DPRD Propinsi / 0.01.00.00.0000.000									
KODE REKENING				URAIAN				Angg. Stlh Perubahan ( Rp. )		Realisasi ( Rp. )		Bertambah / (Berkurang)		%		DASAR HUKUM			
1				2				3		4		5 = 4 - 3		6		7			
JUMLAH PENDAPATAN								0.00		0.00		0.00		0.00					
1.20	001			5				BELANJA DAERAH											
1.20	001			5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG				41,345,220,000.00	37,308,144,049.00	(4,037,075,951.00)	90.24				
1.20	001			5	1	1		BELANJA PEGAWAI				41,345,220,000.00	37,308,144,049.00	(4,037,075,951.00)	90.24				
JUMLAH BELANJA								41,345,220,000.00		37,308,144,049.00		4,037,075,951.00		90.24					
SURPLUS / (DEFISIT)								(41,345,220,000.00)		(37,308,144,049.00)		(4,037,075,951.00)		0.00					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN								0.00		0.00		0.00		0.00					
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN								0.00		0.00		0.00		0.00					
PEMBIAYAAN NETTO								0.00		0.00		0.00		0.00					



URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN  
 ORGANISASI : 1.20.380 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / 7.00.00.00.0000.000

KODE REKENING						URAIAN	Angg. Stlh Perubahan ( Rp. )	Realisasi ( Rp. )	Bertambah / (Berkurang)	%	DASAR HUKUM
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	380			6	2 3	Pembayaran Pokok Utang	9,387,800,000.00	8,169,288,822.00	(1.218,511,178.00)	87.02	
1.20	380			6	2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	4,819,060,710.00	4,819,060,710.00	0.00	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN							9,255,387,800,000.00	4,456,716,331,883.00	4,798,671,468,117.00	100.00	
PEMBIAYAAN NETTO							(4,529,271,468,117.00)	3,137,278,444,590.00	(1,391,993,023,527.00)	3.43	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Angg. Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang) / %			
						Jenis Belanja			Jumlah
						Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1					2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1					URUSAN WAJIB	2,863,657,837,980.00 2,109,785,419,208.00 (753,872,418,772.00) 73.67	17,021,823,489,019.00 11,697,575,810,369.00 (5,324,247,678,650.00) 68.72	25,693,797,490,501.00 10,186,444,464,168.00 (15,507,353,026,333.00) 39.65	45,579,278,817,500.00 23,993,805,693,745.00 (21,585,473,123,755.00) 52.64
1	01				PENDIDIKAN	376,837,059,174.00 314,062,575,378.00 (62,774,483,796.00) 83.34	1,848,201,621,787.00 1,550,461,428,688.00 (3,062,544,043,255.00) 83.89	4,987,699,837,858.00 2,285,670,471,498.00 (2,702,029,366,360.00) 45.83	7,212,738,518,819.00 4,150,194,475,564.00 (3,062,544,043,255.00) 57.54
1	01	001			DINAS PENDIDIKAN	376,837,059,174.00 314,062,575,378.00 (62,774,483,796.00) 83.34	1,848,172,691,787.00 1,550,461,428,688.00 (297,711,263,099.00) 83.89	4,987,699,837,858.00 2,285,670,471,498.00 (2,702,029,366,360.00) 45.83	7,212,709,588,819.00 4,150,194,475,564.00 (3,062,515,113,255.00) 57.54
1	01	002	18		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD	0.00 0.00 0.00 0.00	52,200,000.00 52,200,000.00 0.00 100.00	27,225,000.00 26,510,000.00 (715,000.00) 97.37	79,425,000.00 78,710,000.00 (715,000.00) 99.10
1	01	002	18	009	Pengadaan Software Pembelajaran materi pelatihan	0.00 0.00 0.00 0.00	52,200,000.00 52,200,000.00 0.00 100.00	27,225,000.00 26,510,000.00 (715,000.00) 97.37	79,425,000.00 78,710,000.00 (715,000.00) 99.10
1	01	003	18		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD	61,472,500.00 14,667,500.00 (46,805,000.00) 23.86	184,531,086.00 39,749,500.00 (144,781,586.00) 21.54	0.00 0.00 0.00 0.00	246,003,586.00 54,417,000.00 (191,586,586.00) 22.12
1	01	003	18	006	Partisipasi Planetarium dalam Pameran	46,788,500.00 1,960,000.00 (44,828,500.00)	103,210,176.00 5,064,000.00 (98,146,176.00)	0.00 0.00 0.00	149,998,676.00 7,024,000.00 (142,974,676.00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Angg. Setelah Perubahan / Realisasi / Bertambah (Berkurang) / %			
		Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
		0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		2,908,859,740,120.00	18,299,995,880,244.00	26,203,408,950,505.00	47,412,264,570,869.00
		2,139,962,569,428.00	12,730,137,651,309.00	10,480,597,638,735.00	25,350,697,859,472.00
		(768,897,170,692.00)	(5,569,858,228,935.00)	(15,722,811,311,770.00)	(22,061,566,711,397.00)
		73.57	69.56	40.00	53.47

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN  
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Kode			Uraian	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / ( Berkurang )	%
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6
01			PELAYANAN UMUM	61,624,576,233,903.00	36,625,004,714,822.00	(24,999,571,519,081.00)	59.43
01	1	09	PERTANAHAN	9,904,243,008.00	2,166,212,500.00	(7,738,030,508.00)	21.87
01	1	22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	257,047,390,462.00	192,444,854,827.00	(64,602,535,635.00)	74.87
01	1	26	PERPUSTAKAAN	342,177,378,703.00	157,693,315,440.00	(184,484,063,263.00)	46.09
01	1	16	PENANAMAN MODAL	24,098,010,353.00	16,642,627,210.00	(7,455,383,143.00)	69.06
01	1	06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	180,657,723,373.00	131,940,161,779.00	(48,717,561,594.00)	73.03
01	1	18	PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,126,246,831,447.00	710,715,187,461.00	(415,531,643,986.00)	63.10
01	1	03	PEKERJAAN UMUM	11,942,187,728,949.00	4,772,105,254,312.00	(7,170,082,474,637.00)	39.96
01	1	15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	416,850,808,664.00	196,862,290,120.00	(219,988,518,544.00)	47.23
01	1	17	KEBUDAYAAN	919,595,725,299.00	688,431,617,345.00	(231,164,107,954.00)	74.86
01	2	01	PERTANIAN	42,561,086,153.00	24,969,405,351.00	(17,591,680,802.00)	58.67
01	1	14	KETENAGAKERJAAN	361,146,771,493.00	276,052,812,381.00	(85,093,959,112.00)	76.44
01	1	24	KEARSIPAN	63,253,292,456.00	41,427,579,913.00	(21,825,712,543.00)	65.49
01	1	07	PERHUBUNGAN	2,879,072,223,814.00	1,399,052,912,016.00	(1,480,019,311,798.00)	48.59
01	1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	13,283,177,805,597.00	8,334,013,713,027.00	(4,949,164,092,570.00)	62.74

Kode			Uraian	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / ( Berkurang )	%
1			2	3	4	5 = 4 - 3	6
02	1	21	KETAHANAN PANGAN	52,384,393,514.00	36,586,729,302.00	(15,797,664,212.00)	69.84
02	2	07	INDUSTRI	45,452,834,114.00	26,815,493,569.00	(18,637,340,545.00)	59.00
02	2	01	PERTANIAN	58,119,934,180.00	48,568,474,665.00	(9,551,459,515.00)	83.57
02	2	02	KEHUTANAN	1,900,429,085.00	1,761,690,350.00	(138,738,735.00)	92.70
02	2	05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	412,435,037,545.00	336,424,892,256.00	(76,010,145,289.00)	81.57
02	1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	14,120,283,393.00	10,492,534,164.00	(3,627,749,229.00)	74.31
03			KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
04			EKONOMI	0.00	0.00	0.00	0.00
05			LINGKUNGAN HIDUP	0.00	0.00	0.00	0.00
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	0.00	0.00	0.00	0.00
07			KESEHATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
09			AGAMA *)	0.00	0.00	0.00	0.00
10			PENDIDIKAN	0.00	0.00	0.00	0.00
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				63,650,106,383,473.00	37,799,664,298,459.00	(25,850,442,085,014.00)	59.39

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Hal. 3 dari 3



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAFTAR PIUTANG DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Penambahan 1 Jan - 31 Des 2014	Pengurangan 1 Jan - 31 Des 2014	Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
1	2	3	4	5	6= (3+4-5)
1	Piutang Pajak	4.524.910.233.446,00	935.046.900.937,00		5.459.957.134.383,00
2	Piutang Retribusi	92.205.813.520,00		13.515.918.142,00	78.689.895.378,00
3	Piutang BLUD	74.196.737.748,00	161.611.235.713,00	2.347.927.154,00	233.460.046.307,00
	Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	-		-	-
	Piutang BLUD Pelayanan Transportasi	-		-	-
	Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi	-		-	-
	Piutang BLUD Lainnya	-		-	-
	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	3.636.079.750,00		2.235.465.000,00	1.400.614.750,00
	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	44.200.000,00		21.765.000,00	22.435.000,00
	Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan	831.788.397,00	1.112.768.405,00		1.944.556.802,00
	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	184.682.666,00		90.697.154,00	93.985.512,00
	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	27.271.180.217,00	-		27.271.180.217,00
	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	41.952.794.517,00	160.115.985.008,00		202.068.779.525,00
	Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	254.192.700,00	382.482.300,00		636.675.000,00
	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway	21.819.501,00		-	21.819.501,00
4	Piutang Dana Perimbangan	-		-	-
5	Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	1.296.397.959,00		324.863.628,00	971.534.331,00
6	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	14.614.290.897,00	1.531.269.889,00		16.145.560.786,00
7	Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	18.672.626.283,00	20.568.286.701,00		39.240.912.984,00
8	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	98.034.010.811,00	2.484.104.040,00		100.518.114.851,00
9	Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	62.188.169.818,00		15.688.587.687,00	46.499.582.131,00
10	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	2.938.272.353,00	694.299.267,00		3.632.571.620,00
11	Piutang Lainnya	31.708.044.568,00	153.080.791.945,00	8.090.797.092,00	176.698.039.421,00
	Piutang Dividen/Kontribusi	2.575.104.967,00		2.070.074.101,00	505.030.866,00
	Piutang Jasa Giro	-	480.390,00		480.390,00
	Piutang Bunga Deposito	7.802.739.727,00	23.662.465.753,00		31.465.205.480,00
	Piutang Sanksi Pajak	89.326.263,00	127.705.365.643,00		127.794.691.906,00
	Piutang Denda Retribusi	5.839.134.120,00	1.496.183.869,00		7.335.317.989,00
	Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	-		4.419.140.000,00
	Piutang Tagihan Listrik dan Air	3.510.890.261,00		1.220.722.991,00	2.290.167.270,00
	Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	6.895.480.363,00		4.800.000.000,00	2.095.480.363,00
	Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	576.228.867,00	216.296.290,00		792.525.157,00
	Jumlah	4.920.764.597.403,00	1.275.016.888.492,00	39.968.093.703,00	6.155.813.392.192,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Investasi	Tahun Pertama Investasi	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2014	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2014	Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah						
		1992	PDAM Jaya	-	-	-	-
		1985	PD Dharma Jaya	33.148.897.467,00		1.858.520.893,00	31.290.376.574,00
		1982	PD Pembangunan Sarana Jaya	240.139.663.718,00	756.174.177.282,00		996.313.841.000,00
		1982	PD Pasar Jaya	376.135.756.773,00	170.009.570.038,00		546.145.326.811,00
		1991	PD PAL Jaya	186.692.675.313,00	249.264.463.407,00		435.957.138.720,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah			836.116.993.271,00	1.175.448.210.727,00	1.858.520.893,00	2.009.706.683.105,00
2	Penyertaan Modal Pada Patungan						
		1961	PT Pembangunan Jaya	1.465.412.281.812,00	154.285.150.284,00		1.619.697.432.096,00
		1972	PT Food Station Tjipinang	15.741.942.380,00	36.042.082.924,00		51.784.025.304,00
		1973	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	128.035.579.318,00	23.378.397.980,00		151.413.977.298,00
		1970	PT Delta Djakarta Tbk	175.081.535.080,00	23.632.354.861,00		198.713.889.941,00
		1991	PT Pembangunan Jaya Ancol	985.572.253.383,00	107.798.074.201,00		1.093.370.327.584,00
		1971	PT Ratax Armada	26.323.830,00		-	26.323.830,00
		2002	PT Kawasan Benkat Nusantara	209.692.695.000,00	-		209.692.695.000,00
		1971	PT Cermani Toka	27.059.360.000,00	-		27.059.360.000,00
		1971	PT Pakuan International	1.345.900.000,00	-		1.345.900.000,00
		1992	PT Grahasahani Suryajaya	3.951.000.000,00	-		3.951.000.000,00
		1989	PT Asuransi Bangun Askrida	8.680.000.000,00	-		8.680.000.000,00
		1997	PT Jakarta Propertindo	1.703.827.549.932,00	1.132.208.743.304,00		2.836.036.293.236,00
		1993	PT Bank DKI Jakarta	3.097.470.225.354,00	1.257.648.466.670,00		4.355.118.692.024,00
		2004	PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	-		39.375.000.000,00
		2004	PT Jakarta Tourisindo	485.830.396.127,00		921.396.383,00	484.908.999.744,00
		2004	PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	-		51.157.222.000,00
		2008	PT Mass Rapid Transit Jakarta	1.374.382.633.668,00	433.285.739.384,00		1.807.668.373.052,00
		2014	PT Transportasi Jakarta	-	693.537.815.322,00		693.537.815.322,00
		2014	PT Penjamin Kredit Daerah	-	54.655.264.714,00		54.655.264.714,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Patungan			9.772.641.897.884,00	3.916.472.089.644,00	921.396.383,00	13.688.192.591.145,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah			10.608.758.891.155,00	5.091.920.300.371,00	2.779.917.276,00	15.697.899.274.250,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2014

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2013	271.561.924.821.489	13.392.474.082.635	15.566.967.164.876	29.357.168.861.315	1.318.843.852.752	1.680.312.848.375	332.877.691.631.442
<b>Mutasi Penambahan</b>							
Belanja Modal Tahun Anggaran 2014	1.754.586.883.131	4.062.228.522.758	2.589.956.270.028	1.599.630.901.228	404.715.813.104	-	10.411.118.390.249
Kapitalisasi Non Belanja Modal	2.994.995.390	31.320.603.570	209.623.608.565	79.566.961.648	11.962.137.196	12.550.583.972	348.018.890.341
Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	-	66.375.839.119	4.487.347.000	-	31	-	70.863.186.150
Koreksi Kurang Catat Nilai	161.585.000	1.594.979.317	1.721.827.699	360.000.000	-	-	3.838.392.016
Koreksi Kurang Catat Barang	12.225.680.000	5.259.166.061	774.340.400	-	18.340.975	-	18.277.527.436
Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP Sudah Selesai Dikerjakan)	1.018.027.848	709.539.000	370.172.507.444	128.330.189.013	288.403.500	-	500.518.666.805
Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	-	18.235.570.172	701.466.546	61.380.000	386.635.773	-	19.385.052.491
Hutang Pihak Ke-3	-	-	1.148.776.079	143.902.000	-	120.308.375.049	121.601.053.128
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	11.064.658.826	66.814.160.148	231.696.572.325	68.615.427.326	992.087.882	-	379.182.906.507
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	-	110.563.000	49.200.000	-	-	-	159.763.000
Reklasifikasi dari BM 2014 Ke KDP	-	-	-	-	-	1.497.542.993.068	1.497.542.993.068
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	60.671.494.000	-	193.281.717.534	-	-	-	253.953.211.534
Koreksi Penambahan Lain-lain	139.466.710.000	30.532.546.674	52.323.799.266	496.273.885	78	23.451.755.000	246.271.084.903
<b>Total Penambahan</b>	<b>1.982.190.034.195</b>	<b>4.283.181.489.819</b>	<b>3.655.937.432.886</b>	<b>1.877.205.035.100</b>	<b>418.363.418.539</b>	<b>1.653.853.707.089</b>	<b>13.870.731.117.628</b>
<b>Mutasi Pengurangan</b>							
Penghapusan	-	1.093.400.000	163.801.396.835	3.111.440.000	-	-	168.006.236.835
Pengurangan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal Tahun 2014 yang diserahkan kepihak lain diluar SKPD	-	16.587.985.769	13.329.160.637	582.538.057	2.570.677.605	-	33.070.362.068
Pengurangan Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2014 yang diserahkan ke pihak lain di luar SKPD	-	996.649.500	-	1.750.000	51.830.750	-	1.050.230.250
Pengurangan Aset Tetap yang berasal dari belanja modal tahun 2014 yang belum siap digunakan direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	758.473.010	-	1.327.976.271.847	168.583.608.596	224.639.615	-	1.497.542.993.068
Reklasifikasi BM 2014 Ke Persediaan	4.538.000	38.838.042.072	57.037.982	448.130.953	131.136.415	-	39.478.885.422
Reklasifikasi BM 2014 Ke Ekstrakomtabel	-	19.746.272.716	5.557.199.565	65.314.350	35.453.920.347	-	60.822.706.978
Reklasifikasi Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2014 ke persediaan	-	9.987.405.397	-	-	5.400.000	-	9.992.805.397
Reklasifikasi Aset Tetap ke ekstrakomtabel yang diperoleh sebelum tahun 2014	-	2.920.132.890	4.079.708.139	-	38.432.824.300	-	45.432.665.329
Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai ke lima golongan aset	-	-	-	-	-	500.518.666.805	500.518.666.805
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	-	54.795.419.289	1.888.961.900	56.659.245	7.800.000	-	56.748.840.434
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	-	22.659.161.210	-	45.650.000	4.467.895.100	-	27.172.706.310
Koreksi Lebih Catat Nilai	951.552.000	13.166.126.293	1.344.032.664	23.192.566.453	48.066.000	1.302.086.595	40.004.430.005
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	752.589.432	4.626.069.489	76.091.765.796	29.600.360.543	268.112.121.247	-	379.182.906.507
Koreksi aset tetap berasal dari Belanja Modal Tahun 2013 karena Kurang Volume Pekerjaan	-	3.512.930.552	424.436.615	1.025.675.256.653	-	14.335.250	1.029.626.959.070

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Koreksi aset tetap berasal dari Belanja Modal Tahun 2014 karena Kurang Volume Pekerjaan	48.432.381	896.815	5.574.087.691	265.279.301	499.761.275	2.389.536.526	8.777.993.989
Koreksi Lebih catat volume aset	15.191.037.800	125.931.445.858	119.724.935.897	1.465.845.015	25.346.632.497	-	287.659.897.067
Koreksi Pengurangan Lain-Lain	6.767.140.400	170.696.551.219	118.296.109.382	250.045.286.757	135.472.220	34.848.379.186	580.788.939.164
Total Pengurangan	24.473.763.023	485.558.489.069	1.838.145.104.950	1.503.139.685.923	375.488.177.371	539.073.004.362	4.765.878.224.698
Saldo	273.519.641.092.661	17.190.097.083.385	17.384.759.492.812	29.731.234.210.492	1.361.719.093.920	2.795.093.551.102	341.982.544.524.372

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA  
 PER 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2014	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2014	Saldo Akhir Per 31 Desember 2014
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	61.619.785.278,00	-	5.472.075.169,00	56.147.710.109,00
	- Penjualan Angsuran Rumah Susun	61.619.785.278,00		5.472.075.169,00	56.147.710.109,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	959.380.303,00		959.380.303,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.343.483.302.597,00	235.368.475.320,00	-	3.578.851.777.917,00
	- Bangun Guna Serah (BOT)	339.015.103.572,00	-		339.015.103.572,00
	- Bangun Serah Guna (BTO)	995.642.946.132,00	-		995.642.946.132,00
	- Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	-		268.354.876.000,00
	- Aset Kerjasama Pihak Ketiga	1.740.470.376.893,00	235.368.475.320,00		1.975.838.852.213,00
4	Aset Tidak berwujud	86.147.710.157,00	104.897.784.429,00		191.045.494.586,00
5	Aset Lain-lain	45.509.109.837.233,00	2.096.371.196.121,00	2.075.460.000,00	47.603.405.573.354,00
	- Aset Rusak Berat	588.800.555.542,00	34.138.251.626,00		622.938.807.168,00
	- Aset Belum Validasi	24.666.548.175.762,00		2.075.460.000,00	24.664.472.715.762,00
	- Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	125.609.000,00	10.200.000,00		135.809.000,00
	- Aset Lain-lain di BLUD	3.548.392.265,00	-		3.548.392.265,00
	- Kas Dikonsinyasikan	119.441.613.862,00	6.283.168.000,00		125.724.781.862,00
	- Aset Fasos Fasum	20.117.706.758.340,00	2.055.545.404.560,00		22.173.252.162.900,00
	- Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	-		108.531.052,00
	- Aset di BP THR Lokasari	12.830.201.410,00	394.171.935,00		13.224.373.345,00
	Jumlah	49.000.360.635.265,00	2.437.596.836.173,00	7.547.535.169,00	51.430.409.936.269,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA



DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
PER 31 DESEMBER 2014

NO	SKPD	KDP Per 31 Desember Th 2013	Penambahan KDP Tahun 2014	Pengurangan KDP Reklas ke Aset Tetap	Pengurangan KDP Lain-lain	KDP Per 31 Desember 2014
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	236.392.707.777	296.260.356.674	102.778.352.799	1.366.467.437	428.508.244.215
2	Sudin PU Jalan - Jakpus	245.000.000	335.005.000	-	-	580.005.000
3	Sudin PU Tata Air - Jakpus	-	621.307.003	-	164.590.820	456.716.183
4	Sudin PU Tata Air - Jakut	6.292.843.294	-	6.292.843.294	-	-
5	Sudin PU Jalan - Jakbar	-	1.752.797.250	-	-	1.752.797.250
6	Sudin PU Tata Air - Jakbar	-	4.350.000	-	-	4.350.000
7	Sudin PU. I ( Jalan dan Jembatan ) - Jaksel	8.106.675.169	459.848.500	-	-	8.566.523.669
8	Sudin PU. II ( Tata Air ) - Jaksel	4.314.675.590	-	4.314.675.590	-	-
9	Sudin PU Tata Air - Jaktim	330.000.000	-	-	-	330.000.000
10	Sudin Pekerjaan Umum - Kep. Seribu	-	272.209.000	-	-	272.209.000
11	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	297.431.968.770	281.132.922.766	216.010.775.600	65.891.000	362.488.224.936
12	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	9.273.027.240	575.882.242	1.784.429.589	43.485.275	8.020.994.618
13	Sudin Pertamanan - Jakut	-	224.639.615	-	-	224.639.615
14	DINAS PERHUBUNGAN	79.992.414.875	185.990.250	-	-	80.178.405.125
15	UPT Terminal dan Angkutan Jalan	-	15.781.293.530	-	-	15.781.293.530
16	UPT Pengelola Perparkiran	-	253.839.000	-	-	253.839.000
17	UPT Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	23.846.125.315	-	-	-	23.846.125.315
18	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang	-	77.832.440	-	-	77.832.440
19	BLUD RS Koja	7.010.748.000	152.679.857.600	-	-	159.690.605.600
20	BLUD RS Pasar Rebo	639.021.873	-	-	-	639.021.873
21	BLUD RS Budhi Asih	8.074.040.050	135.668.779.900	-	2.222.813.775	141.520.006.175
22	BLUD RS Duren Sawit	477.732.800	-	-	-	477.732.800
23	DINAS KESEHATAN	3.511.201.010	140.575.570.580	-	-	144.086.771.590
24	Sudin Kesehatan - Jakpus	1.171.181.750	7.236.535.000	-	-	8.407.716.750
25	Sudin Kesehatan - Jakut	162.268.550	10.969.239.370	-	-	11.131.507.920
26	Sudin Kesehatan - Jakbar	294.144.250	10.180.411.000	-	-	10.474.555.250
27	Sudin Kesehatan - Jaksel	924.319.400	435.058.790	-	-	1.359.378.190

NO	SKPD	KDP Per 31 Desember Th 2013	Penambahan KDP Tahun 2014	Pengurangan KDP Reklas ke Aset Tetap	Pengurangan KDP Lain-lain	KDP Per 31 Desember 2014
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
28	Sudin Kesehatan - Jaktim	2.186.612.825	18.062.827.450	1.321.784.450	166.722.751	18.760.933.074
29	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	-	127.805.000	-	-	127.805.000
30	DINAS PENDIDIKAN	380.981.067.109	240.216.676.981	31.576.546.600	-	589.621.197.490
31	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	99.329.347.025	108.538.848.848	-	-	207.868.195.873
32	Gelanggang Olahraga Sunter	-	49.758.500	-	-	49.758.500
33	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakbar	317.737.050	-	-	-	317.737.050
34	Kantor Keluarga Berencana - Jaksel	-	2.442.238.175	-	-	2.442.238.175
35	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	258.932.327	109.579.000	-	-	368.511.327
36	Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - Jaktim	-	76.439.000	-	-	76.439.000
37	UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	262.922.000	-	-	-	262.922.000
38	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	814.448.875	245.525.936	-	-	1.059.974.811
39	Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan	-	419.074.759	-	-	419.074.759
40	Balai Proteksi Tanaman	73.493.125	-	-	-	73.493.125
41	Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	265.559.500	-	-	-	265.559.500
42	BLUD Taman Marga Satwa Ragunan	32.854.600	-	-	-	32.854.600
43	Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura	250.499.063	-	250.499.063	-	-
44	Pusat Perkayuan	-	101.363.375	-	-	101.363.375
45	Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan	-	1.026.071.090	-	-	1.026.071.090
46	Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan	37.209.531.887	5.348.862.930	28.686.666.952	14.335.250	13.857.392.615
47	Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaksel	-	8.650.000	-	-	8.650.000
48	Sudin Pertanian dan Kehutanan - Jaktim	-	56.911.250	-	-	56.911.250
49	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	50.498.942.873	-	15.989.049.582	34.509.893.291	-
50	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakbar	345.287.706	-	345.149.748	137.958	-
51	DINAS PELAYANAN PAJAK	3.598.889.000	610.000.000	2.633.809.000	-	1.575.080.000
52	Sudin Kebersihan - Jaktim	-	1.705.461.800	-	-	1.705.461.800
53	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	108.075.066.996	48.657.418.000	-	-	156.732.484.996
54	UPT Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII	5.931.037.688	-	-	-	5.931.037.688
55	Sudin Kebudayaan - Jaktim	64.220.000	-	-	-	64.220.000
56	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	102.230.000	-	-	-	102.230.000
57	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat	21.565.577.000	-	21.565.577.000	-	-
58	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	39.595.298.000	-	-	39.595.298.000
59	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	88.742.500	-	-	-	88.742.500
60	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaktim	288.403.500	-	288.403.500	-	-
61	Kota Administrasi Jakarta Pusat	64.006.606.035	72.811.741.830	-	-	136.818.347.865
62	Kota Administrasi Jakarta Utara	442.855.700	6.018.843.997	-	-	6.461.699.697
63	Kota Administrasi Jakarta Barat	35.768.803.597	23.451.755.000	-	-	59.220.558.597
64	Kota Administrasi Jakarta Selatan	25.607.322.000	19.510.946.484	34.683.688.000	-	10.434.580.484

NO	SKPD	KDP Per 31 Desember Th 2013	Penambahan KDP Tahun 2014	Pengurangan KDP Reklas ke Aset Tetap	Pengurangan KDP Lain-lain	KDP Per 31 Desember 2014
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
65	Kota Administrasi Jakarta Timur	68.920.573.281	8.977.884.174	31.996.416.038		45.902.041.417
66	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	84.535.189.400	-	-		84.535.189.400
	Jumlah	1.680.312.848.375	1.653.853.707.089	500.518.666.805	38.554.337.557	2.795.093.551.102

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
 Tanggal 31 Desember 2014

No.	Maksud Mengadakan Dana Cadangan	Tahun Mulai Mengadakan Dana Cadangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2014	Penambahan 1 Jan s.d 31 Des 2014	Pengurangan 1 Jan s.d 31 Des 2014	Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak dapat ditanggulangi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2000	894.114.628.239,00	73.101.911.062,00	-	967.216.539.301,00	Sesuai Perda No.10/1999 tentang Dana Cadangan Daerah. DCD awal disediakan pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
2	Membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran						Tambahan DCD selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp73.101.911.062,00 berasal dari endapatan bunga deposito DCD.
Jumlah			894.114.628.239,00	73.101.911.062,00	-	967.216.539.301,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN 1.11  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2014

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
							Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OECF IP-414 SLA 876	04 Nopember 1993	JPY 3.860.000.000,00	20 tahun	11,75	Waste Man Improv, Project	8.169.288.822,00	1.218.528.851,00	4.084.644.411,00	245.305.589,35
Jumlah							8.169.288.822,00	1.218.528.851,00	4.084.644.411,00	245.305.589,35

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA

NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Kas Daerah	5.1.4.1.1	9.069.887.775.249,00	7.306.204.021.184,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.4.1.2	404.746.053.001,00	493.519.943.185,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.4.1.3	23.308.500,00	13.951.913.625,00
Kas dan Setara Kas BLUD	5.1.4.1.4	984.007.705.203,00	437.700.431.893,00
Piutang Pajak	5.1.4.1.5	5.459.957.134.383,00	4.524.910.233.446,00
Piutang Retribusi	5.1.4.1.6	78.689.895.378,00	92.205.813.520,00
Piutang BLUD	5.1.4.1.7	233.460.046.307,00	74.196.737.748,00
Piutang Tuntutan Ganli Rugi	5.1.4.1.8	16.145.560.786,00	14.614.290.897,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	5.1.4.1.9	971.534.331,00	1.296.397.959,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	5.1.4.1.10	39.240.912.984,00	18.672.626.283,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	5.1.4.1.11	100.518.114.851,00	98.034.010.811,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.1.4.1.12	46.499.582.131,00	62.188.169.818,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	5.1.4.1.13	3.632.571.620,00	2.938.272.353,00
Piutang Lainnya	5.1.4.1.14	176.698.039.421,00	31.708.044.568,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.1.4.1.15	(2.604.153.666.109,00)	(1.884.004.113.769,00)
Aset Lancar Lainnya	5.1.4.1.16	228.768.215.755,00	51.703.819.928,00
Persediaan	5.1.4.1.17	633.043.730.336,00	492.104.598.483,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>14.872.136.614.127,00</b>	<b>11.831.945.211.932,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
Investasi Nonpermanen	5.1.4.2.1	403.394.131.382,00	447.211.521.471,00
Investasi dalam Dana Bergulir		897.187.591.237,00	892.368.530.527,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(493.793.459.855,00)	(445.157.009.056,00)
Investasi Permanen	5.1.4.2.2	15.697.899.274.250,00	10.608.758.891.155,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>16.101.293.405.632,00</b>	<b>11.055.970.412.626,00</b>
<b>Aset tetap</b>	5.1.4.3		
Tanah		273.519.641.092.661,00	271.561.924.821.489,00
Peralatan dan Mesin		17.190.097.083.385,00	13.392.474.082.635,00
Gedung dan Bangunan		17.384.759.492.812,00	15.566.967.164.876,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		29.731.234.210.492,00	29.357.168.861.315,00
Aset Tetap Lainnya		1.361.719.093.920,00	1.318.843.852.752,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.795.093.551.102,00	1.680.312.848.375,00
<b>Jumlah Aset tetap</b>		<b>341.982.644.524.372,00</b>	<b>332.877.691.631.442,00</b>
<b>Dana Cadangan</b>	5.1.4.4	<b>987.216.639.301,00</b>	<b>894.114.628.239,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.1.4.5.1	56.147.710.109,00	61.619.785.278,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.1.4.5.2	964.201.310,00	-
Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganli Kerugian Daerah Tak Tertagih		(4.821.007,00)	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.4.5.3	3.578.851.777.917,00	3.343.483.302.597,00
Aset Tidak Berwujud	5.1.4.5.4	191.045.494.586,00	86.147.710.157,00
Aset Lain-lain	5.1.4.5.5	47.603.405.573.354,00	45.509.109.837.233,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>51.430.409.936.269,00</b>	<b>49.000.360.635.265,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>425.353.600.919.701,00</b>	<b>405.660.082.519.504,00</b>



NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang PFK	5.1.5.1.1	302.606.765.141,00	199.151.665.095,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	5.1.5.1.2 a	183.979.192,00	551.937.576,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	5.1.5.1.2.b	4.084.644.411,00	8.169.288.822,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.1.5.1.3	19.492.721.268,00	17.465.217.829,00
Utang Belanja	5.1.5.1.4	239.294.214.510,00	846.247.377.425,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.5.1.5	11.932.100.484,00	10.964.856.223,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>577.594.425.006,00</b>	<b>1.082.550.342.970,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	5.1.5.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	4.084.644.411,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>4.084.644.411,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>577.594.425.006,00</b>	<b>1.086.634.987.381,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	5.1.6.1		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA)		9.160.897.609.233,00	7.593.994.776.473,00
Pendapatan Ditangguhkan		981.632.154.253,00	446.388.917.178,00
Cadangan Piutang		3.551.659.726.083,00	3.036.760.483.634,00
Cadangan Persediaan		633.043.730.336,00	492.104.598.483,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(261.459.346.539,00)	(871.557.726.734,00)
Cadangan Aset Lancar Lainnya		228.768.215.755,00	51.703.819.928,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>14.294.542.089.121,00</b>	<b>10.749.394.868.962,00</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	5.1.6.2		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		16.101.293.405.632,00	11.055.970.412.626,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		341.982.544.524.372,00	332.877.691.631.442,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		51.430.409.936.269,00	49.000.360.635.265,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	(4.084.644.411,00)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>409.514.247.866.273,00</b>	<b>392.929.938.034.922,00</b>
<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>	5.1.6.3		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		967.216.539.301,00	894.114.628.239,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>		<b>967.216.539.301,00</b>	<b>894.114.628.239,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>424.776.006.494.695,00</b>	<b>404.573.447.532.123,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>425.353.600.919.701,00</b>	<b>405.660.082.519.504,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Ttd.

Basuki T. Purnama

**NERACA**  
**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas</b>	<b>10.458.664.841.953,00</b>	<b>8.251.378.309.887,00</b>
Kas di Kas Daerah	9.069.887.775.249,00	7.306.204.021.184,00
Kas Daerah	8.785.926.290.869,00	7.137.286.587.104,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	272.029.383.896,00	157.952.577.857,00
Kas Non Anggaran	11.932.100.484,00	10.964.856.223,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	404.746.053.001,00	493.519.943.185,00
Sisa Uang Persediaan	374.971.318.364,00	456.708.189.369,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	679.988,00	-
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	29.687.950.334,00	33.045.583.943,00
Uang Titipan	86.104.315,00	3.766.169.873,00
Kas di Bendahara Penerimaan	23.308.500,00	13.951.913.625,00
Pendapatan yang Belum Disetor	23.308.500,00	13.951.913.625,00
Kas dan Setara Kas BLUD	984.007.705.203,00	437.700.431.893,00
Kas Tunai	2.961.908.748,00	4.426.493.508,00
Kas di Bank	829.611.721.688,00	332.963.684.820,00
Kas Transito	149.034.535.329,00	95.046.825.225,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	561.255.396,00	4.145.262.222,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.838.284.042,00	1.118.166.118,00
Piutang	6.155.813.392.192,00	4.920.764.597.403,00
Piutang Pajak	5.459.957.134.383,00	4.524.910.233.446,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	20.138.230.486,00	13.030.738.060,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	238.833.010,00	250.363.610,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.737.829.340,00	-
Piutang Pajak Air Tanah	73.416.317.820,00	64.568.344.284,00
Piutang Pajak Hotel	27.172.627.475,00	15.788.387.989,00
Piutang Pajak Restoran	117.185.517.942,00	99.385.195.640,00
Piutang Pajak Hiburan	46.304.754.264,00	41.557.958.016,00
Piutang Pajak Reklame	220.442.896.236,00	136.502.743.234,00
Piutang Pajak Parkir	5.005.935.702,00	2.542.327.208,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17.914.660.837,00	17.350.149.791,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	4.928.399.531.271,00	4.133.934.025.614,00
Piutang Retribusi	78.689.895.378,00	92.205.813.520,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	33.879.539.886,00	28.900.679.025,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	15.986.860.628,00	16.905.282.575,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	28.823.494.864,00	46.399.851.920,00
Piutang BLUD	233.460.046.307,00	74.196.737.748,00
Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.400.614.750,00	3.636.079.750,00
Piutang BLUD Pengelola Akademik Keperawatan Jayakarta	22.435.000,00	44.200.000,00
Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	1.944.556.802,00	831.788.397,00
Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	93.985.512,00	184.682.666,00
Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	27.271.180.217,00	27.271.180.217,00
Piutang BLUD RSUD dan RSKD	202.068.779.525,00	41.952.794.517,00

NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	636.675.000,00	254.192.700,00
Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway	21.819.501,00	21.819.501,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	16.145.560.786,00	14.614.290.897,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	971.534.331,00	1.296.397.959,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	39.240.912.984,00	18.672.626.283,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	100.518.114.851,00	98.034.010.811,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	46.499.582.131,00	62.188.169.818,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.632.571.620,00	2.938.272.353,00
Piutang Lainnya	176.698.039.421,00	31.708.044.568,00
Piutang Dividen/Kontribusi	505.030.866,00	2.575.104.967,00
Piutang Jasa Giro	480.390,00	-
Piutang Bunga Deposito	31.465.205.480,00	7.802.739.727,00
Piutang Sanksi Pajak	127.794.691.906,00	89.326.263,00
Piutang Denda Retribusi	7.335.317.989,00	5.839.134.120,00
Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Piutang Tagihan Listrik dan Air	2.290.167.270,00	3.510.890.261,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	2.095.480.363,00	6.895.480.363,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	792.525.157,00	576.228.867,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.604.153.666.109,00)	(1.884.004.113.769,00)
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	(2.579.100.761.179,00)	(1.870.629.328.503,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(3.615.968.146,00)	(1.831.723.031,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(178.017.510,00)	(181.895.235,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(18.689.146,00)	-
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(30.984.586.612,00)	(18.591.335.328,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(10.381.703.028,00)	(9.794.508.305,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(61.906.240.104,00)	(55.773.802.052,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(25.431.024.908,00)	(20.433.706.656,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(32.024.742.330,00)	(18.501.712.710,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.691.854.261,00)	(1.387.719.786,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(13.322.868.482,00)	(9.443.931.134,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(2.399.545.066.652,00)	(1.734.688.994.266,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	(9.943.467.597,00)	(1.777.268.226,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(4.853.717,00)	(4.855.037,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(9.356.268.265,00)	(6.356,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(582.345.615,00)	(1.772.406.833,00)
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih	(5.101.783.507,00)	(3.298.925.958,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	(7.003.075,00)	(18.180.401,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	(112.175,00)	(221.000,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	(71.030.418,00)	-
Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	(5.020.345.366,00)	(3.279.253.593,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	(3.183.375,00)	(1.270.964,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway	(109.098,00)	-

NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih	(5.175.429.900,00)	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya	(4.832.223.926,00)	(8.298.591.082,00)
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak	-	(8.932.626,00)
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(203.535.890,00)	(3.870.518.456,00)
Penyisihan Piutang Tunjangan	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(209.548.036,00)	-
Aset Lancar Lainnya	228.768.215.755,00	51.703.819.928,00
Belanja Dibayar di Muka	11.523.076.509,00	11.242.530.437,00
Asuransi Dibayar di muka	11.482.165.550,00	11.242.530.437,00
Sewa Dibayar di muka	40.910.959,00	-
Uang Muka Kerja	217.245.139.246,00	40.461.289.491,00
Uang Muka Kerja di SKPD	217.008.616.905,00	40.311.350.000,00
Uang Muka Kerja di BLUD	236.522.341,00	149.939.491,00
Persediaan	633.043.730.336,00	492.104.598.483,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>14.872.136.514.127,00</b>	<b>11.831.945.211.932,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen	403.394.131.382,00	447.211.521.471,00
Investasi dalam Dana Bergulir	403.394.131.382,00	447.211.521.471,00
Investasi dalam Dana Bergulir	897.187.591.237,00	892.368.530.527,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(493.793.459.855,00)	(445.157.009.056,00)
Investasi Permanen	15.697.899.274.250,00	10.608.758.891.155,00
Penyertaan Modal pada BUMD	2.009.706.683.105,00	836.116.993.271,00
Penyertaan Modal PD Darma Jaya	31.290.376.574,00	33.148.897.467,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	996.313.841.000,00	240.139.663.718,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	546.145.326.811,00	376.135.756.773,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	435.957.138.720,00	186.692.675.313,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	13.688.192.591.145,00	9.772.641.897.884,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	1.619.697.432.096,00	1.465.412.281.812,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	51.784.025.304,00	15.741.942.380,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	151.413.977.298,00	128.035.579.318,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	198.713.889.941,00	175.081.535.080,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.093.370.327.584,00	985.572.253.383,00
Penyertaan Modal PT Ratax Armada	26.323.830,00	26.323.830,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Cemani Toka	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahahahari Suryajaya	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	2.836.036.293.236,00	1.703.827.549.932,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	4.355.118.692.024,00	3.097.470.225.354,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	484.908.999.744,00	485.830.396.127,00

NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	1.807.668.373.052,00	1.374.382.633.668,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	693.537.815.322,00	-
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	54.655.264.714,00	-
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>16.101.293.405.632,00</b>	<b>11.055.970.412.626,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	273.519.641.092.661,00	271.561.924.821.489,00
Peralatan dan Mesin	17.190.097.083.385,00	13.392.474.082.635,00
Gedung dan Bangunan	17.384.759.492.812,00	15.566.967.164.876,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.731.234.210.492,00	29.357.168.861.315,00
Aset Tetap Lainnya	1.361.719.093.920,00	1.318.843.852.752,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.795.093.551.102,00	1.680.312.848.375,00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>341.982.544.524.372,00</b>	<b>332.877.691.631.442,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	967.216.539.301,00	894.114.628.239,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>967.216.539.301,00</b>	<b>894.114.628.239,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	56.147.710.109,00	61.619.785.278,00
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	56.147.710.109,00	61.619.785.278,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	959.380.303,00	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	964.201.310,00	-
Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Tak Tertagih	(4.821.007,00)	-
<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>3.578.851.777.917,00</b>	<b>3.343.483.302.597,00</b>
Bangun Guna Serah ( <i>Build, Operate and Transfer</i> /BOT)	339.015.103.572,00	339.015.103.572,00
Bangun Serah Guna ( <i>Build, Transfer and Operate</i> /BTO)	995.642.946.132,00	995.642.946.132,00
Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	1.975.838.852.213,00	1.740.470.376.893,00
Aset Tidak Berwujud	191.045.494.586,00	86.147.710.157,00
Aset Lain-Lain	47.603.405.573.354,00	45.509.109.837.233,00
Aset Rusak Berat	622.938.807.168,00	588.800.555.542,00
Aset Belum Validasi	24.664.472.715.762,00	24.666.548.175.762,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	135.809.000,00	125.609.000,00
Aset Lain-Lain BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Kas Dikonsinyasikan	125.724.781.862,00	119.441.613.862,00
Aset Fasos dan Fasum	22.173.252.162.900,00	20.117.706.758.340,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari	13.224.373.345,00	12.830.201.410,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>51.430.409.936.269,00</b>	<b>49.000.360.635.265,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>425.353.600.919.701,00</b>	<b>405.660.082.519.504,00</b>



NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	302.606.765.141,00	199.151.665.095,00
Utang PFK di PPKD	272.029.383.896,00	157.952.577.857,00
Utang PFK di SKPD	30.577.381.245,00	41.199.087.238,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.268.623.603,00	8.721.226.398,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	183.979.192,00	551.937.576,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	4.084.644.411,00	8.169.288.822,00
Pendapatan Diterima di Muka	19.492.721.268,00	17.465.217.829,00
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh Pihak III	6.970.338.958,00	5.496.160.140,00
Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO	8.570.285.768,00	7.780.528.621,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	1.838.284.042,00	1.118.166.118,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda	2.113.812.500,00	3.070.362.950,00
Utang Belanja	239.294.214.510,00	846.247.377.425,00
Utang Belanja Pegawai	3.400.887.570,00	928.216.698,00
Utang Belanja TALI	6.494.146.647,00	3.752.423.598,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	51.704.008.153,00	186.787.798.875,00
Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS	6.104.955.893,00	476.691.189.017,00
Utang Belanja BLUD	112.673.016.826,00	165.490.186.318,00
Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD	58.640.105.981,00	12.597.562.919,00
Utang Belanja Lainnya	277.093.440,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.932.100.484,00	10.964.856.223,00
Utang Jaminan	11.932.100.484,00	10.964.856.223,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>577.594.425.006,00</b>	<b>1.082.550.342.970,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	4.084.644.411,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>4.084.644.411,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>577.594.425.006,00</b>	<b>1.086.634.987.381,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	9.160.897.609.233,00	7.593.994.776.473,00
Pendapatan Ditangguhkan	981.632.154.253,00	446.388.917.178,00
Cadangan Piutang	3.551.659.726.083,00	3.036.760.483.634,00
Cadangan Persediaan	633.043.730.336,00	492.104.598.483,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(261.459.346.539,00)	(871.557.726.734,00)
Cadangan Aset Lancar Lainnya	228.768.215.755,00	51.703.819.928,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>14.294.542.089.121,00</b>	<b>10.749.394.868.962,00</b>



NERACA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014 (Audited)	31 DESEMBER 2013 (Audited)
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	16.101.293.405.632,00	11.055.970.412.626,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	341.982.544.524.372,00	332.877.691.631.442,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	51.430.409.936.269,00	49.000.360.635.265,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	(4.084.644.411,00)
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>409.514.247.866.273,00</b>	<b>392.929.938.034.922,00</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	967.216.539.301,00	894.114.628.239,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>967.216.539.301,00</b>	<b>894.114.628.239,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>424.776.006.494.695,00</b>	<b>404.573.447.532.123,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>425.353.600.919.701,00</b>	<b>405.660.082.519.504,00</b>

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Ttd.

Basuki T. Purnama

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2014 Audited	31 Desember 2013 Audited
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Arus Kas Masuk :			
Pajak Daerah	5.1.7.1.1.a	27.050.949.023.586,00	23.370.213.237.450,00
Retribusi daerah	5.1.7.1.1.b	515.162.936.406,00	333.787.343.513,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.7.1.1.c	465.979.962.538,00	397.234.721.942,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.1.7.1.1.d	3.226.099.784.748,00	2.711.756.400.891,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.7.1.1.e	9.279.068.989.723,00	8.863.205.863.857,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.7.1.1.f	312.478.953.549,00	225.151.071.796,00
Dana Alokasi Umum	5.1.7.1.1.g	85.985.282.000,00	299.182.466.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.7.1.1.h	2.482.936.697.000,00	2.129.484.903.500,00
Pendapatan Hibah	5.1.7.1.1.i	10.133.196.000,00	481.903.600,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>43.428.794.825.550,00</b>	<b>38.330.497.912.549,00</b>
Arus Kas Keluar :			
Belanja Pegawai	5.1.7.1.2.a	12.604.588.791.793,00	11.861.669.179.762,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.7.1.2.b	12.582.041.265.502,00	12.633.956.279.658,00
Belanja Bunga	5.1.7.1.2.c	1.218.528.851,00	2.191.752.114,00
Belanja Hibah	5.1.7.1.2.d	1.462.044.387.771,00	1.999.968.587.301,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.7.1.2.e	680.155.340.000,00	1.044.598.129.405,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.7.1.2.f	14.005.706.784,00	44.286.271.230,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.1.1.3	2.136.402.124,00	11.376.869.462,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>27.346.190.422.825,00</b>	<b>27.598.047.068.932,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		<b>16.082.604.402.725,00</b>	<b>10.732.450.843.617,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
Arus Kas Masuk :	5.1.7.2.1		
Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah		210.000.000,00	22.331.460.000,00
Pendapatan Brandgang		3.550.000.000,00	1.865.355.000,00
Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor		0,00	254.675.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		11.642.922.097,00	8.741.389.309,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		161.387.100,00	5.583.830.183,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	10.350.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>15.564.309.197,00</b>	<b>38.787.059.492,00</b>
Arus Kas Keluar :	5.1.7.2.2		
Belanja Tanah		1.754.586.883.131,00	749.179.258.197,00
Belanja Peralatan dan Mesin		4.062.228.522.758,00	4.953.305.974.019,00
Belanja Gedung dan Bangunan		2.589.956.270.028,00	2.714.322.488.763,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.599.630.901.228,00	1.464.462.609.554,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		404.715.813.104,00	814.741.863.779,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>10.411.118.390.249,00</b>	<b>10.696.012.194.312,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		<b>(10.395.554.081.052,00)</b>	<b>(10.657.225.134.820,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2013)	5.1.7.3.1.b	456.708.189.369,00	51.416.205.213,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>456.708.189.369,00</b>	<b>51.416.205.213,00</b>
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.7.3.2.a	73.101.911.062,00	54.037.464.031,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.7.3.2.b	4.033.500.000.000,00	1.841.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.1.7.3.2.c	8.169.288.822,00	8.169.288.822,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	5.1.7.3.2.d	0,00	39.759.399.634,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.3.2.e	4.819.060.710,00	2.400.000.000,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2014)	5.1.7.3.2.f	374.971.318.364,00	456.708.189.369,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>4.494.561.578.958,00</b>	<b>2.402.074.341.856,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		<b>(4.037.853.389.589,00)</b>	<b>(2.350.658.136.643,00)</b>

URAIAN	Catatan	31 Desember 2014 Audited	31 Desember 2013 Audited
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan	5.1.7.4.1	967.244.261,00	1.276.142.353,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		459.869.244,00	413.689.348,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.7.4.3	2.195.517.949.604,00	2.217.045.570.447,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>2.196.945.063.109,00</b>	<b>2.218.735.402.148,00</b>
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.7.4.3	2.081.441.143.565,00	2.094.772.580.779,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>2.081.441.143.565,00</b>	<b>2.094.772.580.779,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>		<b>115.503.919.544,00</b>	<b>123.962.821.369,00</b>
<b>KOREKSI SILPA</b>		<b>(1.017.097.563,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	4.1.7.5	<b>1.763.683.754.065,00</b>	<b>(2.151.469.606.476,00)</b>
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		7.306.204.021.184,00	9.457.673.627.660,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		9.069.887.775.249,00	7.306.204.021.184,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		23.308.500,00	13.951.913.625,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		404.746.053.001,00	493.519.943.185,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		950.807.390.812,00	437.700.431.893,00
Saldo Akhir Kas		<b>10.425.464.527.562,00</b>	<b>8.251.376.309.887,00</b>

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Ttd.

Basuki T. Purnama

**JAYA RAYA**



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
2015**

Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp7.863.394.776.473,00 dan terealisasi Rp7.593.994.776.473,00 atau 96,57 persen. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp9.255.387.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.456.716.331.883,00 atau 48,15 persen. Sehingga nilai pembiayaan neto tahun 2014 sebesar Rp3.137.278.444.590,00.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.160.897.609.233,00, SLPA tersebut telah memperhitungkan koreksi pengurangan atas ketekoran kas sebesar Rp1.017.097.564,00 dan telah diakui sebagai akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014.

**Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,**

**Ttd.**

**Basuki T. Purnama**

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

[illegible]





LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH  
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	Bidang Perbankan								
1.	PT Bank DKI	Audited 2014	1.948.917.000	(1.135.103.000)	813.814.000	211.463.000	(324.835.000)	(234.757.000)	465.685.000
	Sub Total 1		1.948.917.000	(1.135.103.000)	813.814.000	211.463.000	(324.835.000)	(234.757.000)	465.685.000
2	Bidang Asuransi								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2014	1.470.451.601	(1.284.131.827)	186.319.775	(995.541)	-	(32.860.121)	152.464.113
	Sub Total 2		1.470.451.601	(1.284.131.827)	186.319.775	(995.541)	-	(32.860.121)	152.464.113
3	Bidang Konstruksi								
1.	PT Jakarta Properindo (Konsolidasi)	Audited 2014	399.740.219	(221.935.549)	177.804.670	176.835.905	(170.051.166)	(48.692.379)	135.897.030
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2014	6.920.480.014	(5.732.225.313)	1.188.254.701	177.920.987	(92.762.625)	(230.812.115)	1.042.600.948
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Unaudited 2014	64.646.657	(20.282.061)	44.364.596	8.361.745	(6.907.883)	(3.166.052)	42.652.406
	Sub Total 3		7.384.866.890	(5.974.442.923)	1.410.423.967	363.118.637	(269.721.674)	(282.670.546)	1.221.150.384
4	Bidang Jasa Lainnya								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	136.690.927	(127.448.089)	9.242.838	259.482	(8.501.489)		1.000.832
2.	PD AM Jaya	Audited 2014	2.502.074.981	(2.431.890.794)	70.184.187	55.119.324	(30.841.599)	(31.244.498)	63.217.414
3.	PD PAL Jaya	Audited 2014	54.149.014	(29.533.115)	24.615.900	11.087.005	(428.104)	(6.550.337)	28.724.463
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2014	505.381.806	(454.221.889)	51.159.916	56.418.396	(6.416.598)	(24.716.151)	76.445.563
4.	PT Jamkrida	Unaudited 2014	-	(126.763)	(126.763)	158.795	(174)	-	31.858
	Sub Total 4		3.198.296.729	(3.043.220.650)	155.076.078	123.043.002	(46.187.964)	(62.510.986)	169.420.130
5	Bidang Perdagangan								
1.	PT Food Station Tjipinang	Audited 2014	462.718.072	(449.481.163)	13.236.909	(590.151)		(1.803.540)	10.843.219
2.	PD Dharma Jaya	Audited 2013	6.800.289	(8.547.526)	(1.747.237)	236.622	(672.036)	800.459	(1.382.191)
	Sub Total 5		469.518.361	(458.028.689)	11.489.672	(353.528)	(672.036)	(1.003.081)	9.461.028
6	Bidang Pariwisata								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2014	1.101.364.126	(602.089.376)	499.274.750	97.326.800	(292.097.784)	(71.414.077)	233.089.689
2.	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2014	137.171.173	(132.499.480)	4.671.693	4.941.948	(694.613)	(3.896.043)	5.022.985
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	29.471.298	(29.153.103)	318.195	-	(20.590.891)	(2.741.229)	(23.013.924)
4.	PT Pakuan	Audited 2010	3.674.178	(5.243.660)	(1.569.482)	97.737	(57.106)	-	(1.528.851)
	Sub Total 6		1.271.680.775	(768.985.619)	502.695.155	102.366.485	(313.440.394)	(78.051.349)	213.569.898
7	Bidang Kawasan Industri								
1.	PT Jakarta Industrial Estate Puloqadung	Unaudited 2014	55.908.298	(27.767.251)	28.141.048	22.144.543	(4.258.985)	(9.225.865)	36.800.740
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2014	654.330.837	(417.956.023)	236.374.815	105.498.204	(12.265.396)	(66.149.717)	263.457.905

(Dalam Ribuan Rupiah)									
No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
	Sub Total 7		710.239.135	(445.723.273)	264.515.862	127.642.747	(16.524.381)	(75.375.583)	300.258.645
	Jumlah dipindahkan		16.453.970.491	(13.109.635.981)	3.344.334.510	926.284.802	(971.381.449)	(767.228.664)	2.532.009.198
	Jumlah pindahan		16.453.970.491	(13.109.635.981)	3.344.334.510	926.284.802	(971.381.449)	(767.228.664)	2.532.009.198
8	Bidang Angkutan Darat								
1.	PT Ratax Armada	Audited 2013	1.615.083	(2.300.896)	(685.813)	-	(520.528)	-	(1.206.341)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2014	-	(55.674.443)	(55.674.443)	24.003.230	(36.707)	469.803	(31.238.116)
3.	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2014	-	(12.836.999)	(12.836.999)	80.919	(10.770)	-	(12.766.849)
	Sub Total 8		1.615.083	(70.812.338)	(69.197.255)	24.084.149	(568.004)	469.803	(45.211.307)
9	Bidang Aneka Industri								
2.	PT Alakasa Industrindo, Tbk.								
4.	PT Determinan Indah								
	Sub Total 9		1.455.333.473	(1.042.923.060)	412.410.413	24.152.040	(11.654.834)	(103.073.766)	321.833.854
10	Bidang Rumah Sakit								
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2014	187.289.234	(190.215.548)	(2.926.315)	2.959.182	(465.880)	-	(433.012)
	Sub Total 10		187.289.234	(190.215.548)	(2.926.315)	2.959.182	(465.880)	-	(433.012)
	Total Seluruh Bidang Industri		18.098.208.281	(14.413.586.927)	3.684.621.354	977.480.174	(984.070.168)	(669.832.627)	2.608.198.733

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

BASUKI T. PURNAMA